

**PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH KEPALA DESA
DALAM PEMBERIAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT
(BLSM) DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

ESTRI CAHYANI

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang muncul tersebut diduga disebabkan oleh masih kurang baiknya komunikasi Kepala Desa di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran serta masyarakat penerima BLSM dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik, masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM, belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain : melakukan pembinaan terhadap masyarakat, berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya.

Kata kunci : Pelaksanaan, Komunikasi, BLSM

PENDAHULUAN

Aparatur pemerintah desa dapat dikatakan sebagai komunikator juga merupakan komponen sumber daya manusia yang selalu ditingkatkan kemampuannya profesional sesuai tuntutan organisasi dan beban kerja yang dihadapi. Kepala Desa sebagai komunikator harus mampu memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai program-program yang dilaksanakan sehingga dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Hasan (2005:95) mengemukakan pendapat mengenai komunikasi pemerintah yaitu : "Komunikasi pemerintah adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara". Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi pemerintahan berlaku juga untuk pemerintahan desa di mana aparatur desa mengomunikasikan dan menyampaikan ide, program dan gagasan pemerintahan desa kepada masyarakat dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan pelaksanaan program-program berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten

Pangandaran. Hal ini nampak dari beberapa indikator yang memperlihatkan adanya gejala tersebut sebagai berikut.

Masih ada masyarakat miskin dan rentan yang tidak terdata. Contoh : Dari data yang diperoleh dari pemerintah Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran diperoleh keterangan bahwa hanya 15 keluarga miskin/rentan yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Masih ada masyarakat yang sudah mampu seharusnya tidak menerima malah menerima BLSM. Contoh : pemberian dana BLSM masih belum tepat sasaran seperti halnya 4 (empat) orang yang tidak termasuk keluarga miskin dan rentan mendapat BLSM di Dusun Cikangkung.

Masih adanya kesalahan data penerima BLSM sehingga sulit menerima pencairan. Contoh : Masih ada kesalahan data base mengenai nama dan alamat penerima BLSM.

Berdasarkan latar belakang di atas, disusunlah rumusan masalah penelitian ini ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa Dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran?

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam tentang pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa Dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa

Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Sedangkan sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-dokumentasi yang di peroleh dari Pemerintah Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara :
 - a. Observasi, Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan irigasi.
 - b. Wawancara, Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan secara langsung kepada pihak yang sedang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif menurut Sugiyono (2009:245) sebagai berikut :

1. Analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data di lapangan, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
3. Analisis data selama di lapangan, yaitu analisis dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (*key informant*)

yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu 'membukakan pintu' kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Komunikasi

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

Soclaeman (2009:123) mengemukakan pendapat mengenai kodrat manusia yaitu: "Adanya aspek organis-jasmaniah, psikis-rohaniah, dan sosial-kebersamaan yang melekat pada individu, mengakibatkan bahwa kodratnya ialah untuk hidup bersama manusia lain".

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri dalam memenuhi setiap kebutuhannya akan tetapi perlu adanya hubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut terjadi adanya interaksi dan komunikasi satu sama lain.

Komunikasi Interpersonal

Menurut pendapat De Vito (1995:7) "Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang saling menjalin hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal biasanya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu sebagai komunikator dan sebagai komunikan".

Komunikasi interpersonal menurut Supratiknya (1995:34) yaitu bahwa : "Komunikasi interpersonal disebut efektif bila komunikan menginterpretasikan pesan yang diterima seperti yang dimaksud oleh komunikator".

Berdasarkan uraian pengertian komunikasi interpersonal dan situasi komunikasi yang efektif maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan verbal dan non verbal secara timbal balik dari komunikator ke komunikan, pesan diinterpretasi sesuai dengan

maksud pesan, dan ada umpan balik dari pesan yang disampaikan.

Fungsi Komunikasi

Bertolak dari pengertian dan pemaknaan komunikasi yang telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi manusia yang termasuk di dalamnya interaksi kelompok. Komunikasi memiliki peran yang dominan dalam kehidupan manusia sehingga fungsi komunikasi adalah untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasan (2005:22) bahwa fungsi komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Mencapai pengertian satu sama lain
2. Membina kepercayaan
3. Mengkoordinir tindakan
4. Merencanakan strategi
5. Melakukan pembagian pekerjaan
6. Melakukan aktivitas kelompok, dan
7. Berbagi rasa

Apabila dikaitkan dengan kepentingan organisasi pemerintahan, maka setiap organisasi yang secara jelas memiliki kewenangan hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai, dalam hal ini komunikasi memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi dalam berbagai cara.

Robins (Hasan, 2005:23) mengemukakan pendapat bahwa komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu yaitu :

1. Fungsi pengawasan
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional
4. Fungsi informasi

Tujuan Komunikasi

Berlo (Hasan, 2005:26) mengemukakan tujuan komunikasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek yang bersifat umum dan aspek spesifik. Tujuan komunikasi dilihat secara umum meliputi hal-hal yaitu "1) *informative*, 2) *persuasive*, dan 3) *entertainment*".

1. Ditinjau dari aspek *informative*, komunikasi berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang untuk bertindak rasional, objektif dan konkret. Artinya walaupun tujuan komunikasi hanya sekedar memberi dan menerima informasi, namun

pelaku komunikasi harus tetap dalam prinsip objektivitas, rasionalitas, logis dan konkrit.

2. Ditinjau dari aspek *persuasive*, adalah dalam rangka mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai atau sikap mereka. Pengungkapan pesan melalui cara-cara verbal dan nonverbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain.
3. Ditinjau dari aspek *entertainment*, adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, misalnya dalam bentuk hiburan, kesenian, lawakan, dan semacam dengan itu.

Strategi dan Taktik Komunikasi

Berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi dapat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain "strategi dan taktik" berkomunikasi yang dikembangkan komunikator. Lasswell (Hasan, 2005:43) berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya suatu strategi komunikasi ditentukan juga oleh kemampuan sistematis antar komponen-komponen yang terkait yang akan merupakan jawaban terhadap pertanyaan yaitu :

1. *Who*, siapa komunikatornya ?
2. *Say what*, pesan apa yang dinyatakan?
3. *In which chanel*, media apa yang digunakan?
4. *To whom*, siapa komunikannya?
5. *With what effect*, dampak apa yang diharapkan?

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan suatu kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan negara dan pemerintahan. Dikaitkan dengan pemerintahan desa maka kemampuan tersebut dapat meliputi kemampuan mengajak orang lain untuk dapat bekerja sama yang mencakup aktivitas pelayanan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan kemampuan melakukan kontrol atau evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa.

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih

baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Siagian (2012:4) mendefinisikan pembangunan yaitu "Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa"

Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintahan Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Dengan demikian peran dari seorang Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan tidak menutup kemungkinan akan berjalan baik karena adanya kerja sama antara Kepala Desa dan masyarakat.

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, di samping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Suharto (2010:4) mendefinisikan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Selanjutnya menurut Suharto (2010:4) bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha-usaha yang dilakukan secara terencana dengan cara melakukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan standar hidup manusia atau masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Kepala Desa Sebagai Komunikator Pembangunan

Kepala Desa merupakan jabatan kepemimpinan yang diperoleh dari hasil penunjukan atau pemilihan oleh masyarakat desanya sehingga ia memperoleh dukungan dan kepercayaan dari warganya untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan Kepala Desa akan berpengaruh positif tergantung pada peran sosialnya dalam memberikan pengaruh berupa sugesti, larangan, dan dukungan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau berbuat sesuatu. Besarnya peranan itu

tergantung pada besar kecilnya dampak sosial yang disebabkan oleh kepemimpinannya, serta tinggi rendahnya status sosial yang diperolehnya.

Menurut Rivai (2003:21), "Kepemimpinan adalah seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok". Menurutnya ada tiga aplikasi penting dalam kepemimpinan yaitu :

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang.
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya menjadi pemimpin yang baik serta berkualitas.

Selanjutnya Sedarmayanti (2008:130) mengemukakan pendapat mengenai fungsi kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial kelompok/organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dapat mengarahkan atau menggerakkan organisasi dan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama, maka kepala desa harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan setiap program secara tepat.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Sesuai Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak (2013 :28) :

Sasaran program BLSM adalah 15,5 juta Rumah Tangga dengan tingkat sosial ekonomi terendah yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011. Besaran BLSM direncanakan sebesar Rp. 150.000/bulan selama lima bulan. Besar bantuan ini diharapkan dapat membantu Rumah Tangga miskin dan

rentan untuk mempertahankan daya beli ketika terjadi kenaikan harga akibat kenaikan harga BBM.

Berdasarkan kutipan di atas dapat kita ketahui bahwa program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat memiliki tujuan untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan hidup Rumah Tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Berdasarkan Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak (2013 :29) :

BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS dan dokumen pendukung ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai. Untuk menghindari antrian yang berlebihan, lokasi dan jadwal pembayaran akan ditentukan oleh kantor pos dan pemerintah

daerah setempat. Pada hari yang dijadwalkan, RTS dapat mengambil bantuan di kantor pos terdekat. Untuk daerah terpencil, dimana tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus. Apabila Kepala Rumah Tangga yang namanya tertera di KPS tidak dapat mengambil sendiri bantuan BLSM (misalnya karena sakit), maka dapat diwakilkan oleh anggota Rumah Tangga lainnya. Pengambilan bantuan dapat dilakukan dengan menyertakan surat kuasa dan bukti pendukung tambahan (KK atau Surat Keterangan Domisili) sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa BLSM disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap. Penerima BLSM diwajibkan membawa KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan dokumen pendukung lainnya ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Komunikasi Oleh Kepala Desa dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Berikut ini penulis sajikan rekapitulasi jawaban informan pelaksanaan komunikasi oleh kepala desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Jawaban Informan Tentang Pelaksanaan Komunikasi Oleh Kepala Desa dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

DIMENSI	INDIKATOR	JAWABAN INFORMAN	
Keterampilan	Kepala Desa menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat mengenai BLSM	10 (83,33%) orang sudah jelas	2 (16,67%) orang Kurang jelas
	Pesan yang disampaikan Kepala Desa mengenai BLSM dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat	9 (75%) orang Dapat mempengaruhi	3 (25%) orang Kurang dapat mempengaruhi
	Pesan yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai BLSM dapat dipahami oleh masyarakat	8 (66,67%) orang Dapat mempengaruhi	4 (33,33%) orang Kurang dapat mempengaruhi
Sikap	Kepala Desa bersikap ramah dan sopan dalam menyampaikan informasi mengenai BLSM	12 (100%) orang Sudah bersikap ramah dan sopan	-

Pelaksanaan Komunikasi Oleh Kepala Desa
dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

ESTRI CAHYANI

	Kepala Desa bersikap empati terhadap masyarakat sasaran BLSM	12 (100%) orang Sudah bersikap bersikap empati	-
	Kepala Desa merespon setiap pendapat masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai BLSM	12 (100%) orang Sudah bersikap bersikap empati	-
Pengetahuan	Kepala Desa mempunyai latar belakang pendidikan formal yang jelas	12 (100%) orang Memilik latar belakan pendidikan yang jelas	-
	Kepala Desa memahami tentang maksud dan tujuan program sehingga informasi yang disampaikan mengenai BLSM kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku	10 (83,33%) orang Sudah paham	2 (16,67%) orang Belum paham -
	Kepala desa mampu meyakinkan masyarakat sesuai dengan pesan yang disampaikan mengenai BLSM	8 (66,6%) orang Sudah dapat meyakinkan	4 (33,33%) orang Belum dapat meyakinkan
Sistem sosial budaya	Informasi yang disampaikan mengenai BLSM disesuaikan dengan adat dan istiadat masyarakat	10 (83,33%) orang Sudah sesuai	2 (16,67%) orang Belum sesuai
	Informasi yang disampaikan mengenai BLSM disesuaikan dengan tingkat intelektual masyarakat	8 (66,67%) orang Sudah dapat meyakinkan	4 (33,33%) orang Belum dapat meyakinkan
	Informasi yang disampaikan mudah diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat	12 (100%) orang Sudah sesuai	-

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran memperoleh tanggapan positif dari 85,42% informan. Sementara itu 14,58 informan memberikan tanggapan negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian BLSM di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana BLSM di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28) walaupun masih memperoleh tanggapan negatif.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Komunikasi oleh Kepala Desa dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut

1. Belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa yang semestinya dilakukan sebelum program tersebut

dilaksanakan sehingga hasil pelaksanaan program BLSM belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan sasaran program

2. Masih kurang merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik sehingga pesan yang disampaikan belum mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada kepala desa dalam melaksanakan program BLSM
3. Masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM sehingga pemahaman terhadap maksud dan tujuan

program BLSM sehingga dalam pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan rencana dan tujuan program

Upaya-Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh kepala desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dalam suasana yang lebih akrab sehingga masyarakat lebih mudah untuk menerima pesan yang disampaikan
2. Menampung setiap aspirasi dari masyarakat sehingga diketahui harapan yang diinginkan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga program yang akan dilaksanakan dapat lebih dipahami oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian seperti dalam bab sebelumnya, selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28) walaupun masih ada indikator yang kurang.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik sehingga pesan yang disampaikan belum mampu memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada kepala desa dalam melaksanakan program BLSM. Masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM sehingga pemahaman terhadap maksud dan tujuan program BLSM sehingga dalam pelaksanaan program tersebut belum sesuai dengan rencana dan tujuan program. Belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa yang semestinya dilakukan sebelum program tersebut dilaksanakan sehingga hasil pelaksanaan program BLSM belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan sasaran program.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: Melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Pembinaan dilakukan kepada masyarakat ditujukan agar masyarakat juga memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM. Menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya kepala desa melakukan pembinaan secara rutin masyarakat sehingga wawasan dan pengetahuan

Pelaksanaan Komunikasi Oleh Kepala Desa
dalam Pemberian Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
ESTRI CAHYANI

masyarakat lebih meningkat sehingga keterbukaan masyarakat dalam menerima setiap program yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik

2. Sebaiknya kepala desa selalu berusaha untuk mempelajari dan memahami setiap kebijakan program yang akan dilaksanakan sehingga dalam menyampaikan setiap informasi dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat
3. Sebaiknya kepala desa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap program yang dilaksanakan agar tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dapat diketahui sehingga dapat dilakukan perbaikan – perbaikan pada program-program yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- De Vito, Joseph. A. 1995. *Komunikasi Antar Manusia Edisi Ke 5*. Penerjemah : Agus Maulana
- Effendy, 2005. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung ; Remaja Rosdakarya
- Hardjana, Agus M. 2003. *Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal*. Yogyakarta : Kansius
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- J. Lexy, Moleong, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Lunandi, A G. 1992. *Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta : Kansius
- Muhammad, Arni. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung ; Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2004. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung CV. Mandar Maju
- Rivai, M. 2003, *Pokok –pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa
- Scdarmayanti . 2008. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan*

Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama

- Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Surahmad, Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metoda Teknik)*. Bandung. Tarsito
- Soclacman, Munandar. M. 2009. *Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu Sosial)*. Bandung. PT. Refika Aditama
- Muhfiz. Ali. 1986. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta : Universitas terbuka
- Walgito, Bimo. 2001. *Psikologi sosial*. Yogyakarta : Andi

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Buku Pegangan Sosialisasi Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2013

